

# KYAI DAN POLITIK PRAKTIS

(Studi Atas Keterlibatan Politik Kyai Dalam Masyarakat  
di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang)

## SKRIPSI



Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)  
Dalam Bidang Sosiologi



Oleh :

**ERI KUSUMAWATI**

Nim : B05206006

PUSHTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS D.2012 040 505	No. REG : D.2012/505/040
ASAL BUKU :	
TANGGAL :	

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS DAKWAH  
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

2012

**PERNYATAAN  
PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Eri Kusumawati

NIM : B0520606

Program studi : Sosiologi

Alamat : Kedung Mangu Selatan V / 10 A Kenjeran Surabaya

Judul Skripsi : Kyai dan Politik (Studi Atas Keterlibatan Politik kyai dalam Masyarakat Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan di lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar apapun
2. Skripsi ini adalah benar- benar karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 27 Juli 2012

Yang menyatakan,

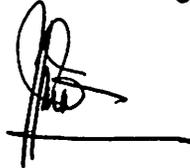
Eri Kusumawati  
B05206006

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Skripsi oleh Eri Kusumawati telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk diujikan.

Surabaya, 14 Juli 2012

Dosen Pembimbing



**Dra. Hj. Nur Mazidah, M.si**  
**Nip. 195306131992032001**

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi Oleh Eri Kusumawati telah dipertahankan didepan  
Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 27 Juli 2012

Mengesahkan,  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Dakwah

**Dekan,**



Dr. H. Aswadi, M.Ag  
NIP. 19600412994031001

**Ketua,**



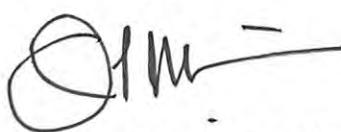
Dra. Hj. Nur Mazidah, M. Si  
NIP. 195306131992032001

**Sekretaris,**



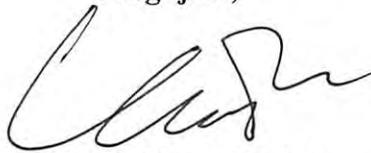
Siti Azizah, S. Ag, M.Si  
NIP. 197703012007102005

**Penguji I,**



Dr. H.M. Shodiq, S.Ag, M.Si  
NIP. 19750423200501002

**Penguji II,**



Amal Taufik S.Pd, M.Si  
NIP.197008021997021001

















seorang Kyai tidak dapat hanya dilihat dari segi apa yang dilakukannya dan dari karakteristik pribadinya saja, tetapi yang penting sejauh mana masyarakat memberikan pengakuan kepadanya.

Gelar kehormatan kyai bagi kalangan elit agama khususnya di Jawa masih sering diperdebatkan lebih - lebih jika dikaitkan dengan politik. Sebagian kalangan berpendapat bahwa kyai seharusnya cukup berperan sebagai pengayom umat terutama dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu lebih tepat jika ia menghindarkan diri dari kegiatan politik. Ada pula yang mengatakan sebaliknya, tidak ada alasan bagi kyai untuk meninggalkan politik praktis, sebab berpolitik merupakan bagian kehidupan agama itu sendiri. Bahkan pada pemilu 1999 ini sebagian besar kyai dari berbagai pondok pesantren yang ada di Indonesia (khususnya Jawa) secara terbuka mulai memasuki kancah perpolitikan dengan dalih demi kemaslahatan umat.

Kyai merupakan pemilik atau penentu utama dalam tradisi pesantren bahkan sering pertumbuhan dan perkembangan pesantren sangat ditentukan oleh kemampuan dan kualitas pribadi kyai. Keterlibatan kyai dalam politik praktis menyebabkan kyai menempati posisi elite politik dalam struktur politik, sehingga banyak diantara mereka yang menjadi elite pemerintah baik pada peringkat lokal maupun peringkat nasional, para pemimpin pesantren yang dikonotasikan dengan kyai atau ulama dari dahulu hingga sekarang mempunyai kekuatan politik yang dominan dan menempati posisi struktur religi politik dari struktur sosial politik masyarakat.



Keterlibatan kyai dalam wilayah politik kekuasaan melahirkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Yang pro berpendapat, bahwa keterlibatan kyai dalam politik bermanfaat paling tidak karena dua hal. Medan dakwah kyai semakin luas, tidak hanya di wilayah kultural seperti biasanya, tetapi juga merambah wilayah struktural. Hadirnya kyai dalam politik kekuasaan akan memberi arti bagi kekuasaan itu sendiri karena "terspiritualisasi". Kekuasaan akan dijadikan sarana pengabdian kepada Tuhan untuk kemudian diabdikan bagi keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Tetapi yang kontra sebaliknya berpendapat bahwa keterlibatan kyai dalam wilayah politik kekuasaan justru menjadikan kerja - kerja kultural kyai terabaikan. Kyai yang selama ini fokus di wilayah kultural seperti melakukan pendidikan (keagamaan) kepada masyarakat, melakukan kontrol terhadap kekuasaan yang menyimpang. Mulai tak terurus karena kyai terserap sepenuhnya untuk kerja-kerja politik kekuasaan. Apalagi sistem kekuasaan saat ini sangat korup sehingga bukan mustahil kyai bisa terjerembab dalam sistem yang korup tersebut. Oleh karena itu, menurut pandangan yang kontra, sebaiknya kyai di wilayah kultural saja sambil menyuarakan kebenaran dari luar struktur.

Kyai sebagai entitas kultural dan sosiologis memang tidak lepas dari konteks struktural yang mengitarinya. Karena itu, kyai tidak mungkin bisa menghindari dari hiruk-pikuk permasalahan politik. Tetapi yang perlu diperluas adalah peran kyai dalam wilayah politik. Dengan kata lain, kyai tidak hanya menjadikan politik kekuasaan sebagai satu-satunya jalan bagi jihad politiknya,













































kepada kehidupan yang mulia menjunjung tinggi budi pekerti kujur dan muhammad tidak pernah dimaksudkan dan mengepalai negara dan politik. Aliran ini disebut sekularisme suatu paham yang memisahkan agama dari negara atau politik, aliran ini menolak pendasaran politik pada islam, atau paling tidak menolak determinasi bentuk negara politik pada islam. pemikiran yang ke tiga aliran berpendapat bahwa bahwa alqur'an tidak terdapat sistem politik, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan berpolitik. sesungguhnya dalam islam tidak terdapat kekuasaan keagamaan selain kewenangan untuk memberikan peringatan secara baik, mengajak orang lain kearah kebaikan dan menariknya dari keburukan. Dan kewenangan ini diberikan kepada setiap muslimin, baik berpangkat tinggi maupun rakyat biasa.

Mengartikan politik kedalam dua definisi. Pertama pandangan yang mengkaitkan politik dengan negara, yakni dengan urusan pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah. Kedua, pandangan yang mengaitkannya dengan masalah kekuasaan, otoritas atau konflik. Perbedaan pengertian ini berkaitan dengan dipergunakannya pendekatan tradisional dan pendekatan perilaku.

Sejatinya efektivitas pembumian nilai-nilai, etika dan peradaban yang menghargai martabat manusia disosialisasikan melalui contoh nyata elite pemimpin yang kemudian di turun ratakan sampai pada tingkat aparat di lapangan. Contoh nyata elite pemimpin mesti diikuti para aparat penegak hukumnya akan menjadikan pembelajaran sosial yang efektif bagi rakyat demi meningkatkan kepatuhan hukum dan kedisiplinan sosial (Albert Bandura 1977). Akibat semua itu, kekhawatiran yang muncul adalah memudarnya

kesakralan atau karismatik kepemimpinan kyai terutama mereka (kyai) yang berpolitik praktis. Apalagi jika kekuasaan (pemerintah) yang diperoleh saat ini dari "hasil upaya kyai", maka hal-hal negatif yang mencuat dalam menjalankan amanah rakyat bisa jadi berdampak buruk terhadap citra kyai tersebut.

Dalam kondisi Negara centang perenang, penegakan hukum masih karut marut dan situasi perpolitikan yang masih kacau balau, kental dengan ketidak-menentuan, sebaiknya kyai jangan terlibat jauh atau larut dalam politik praktis (*low politics*). Justeru kepemimpinan dan power politik yang dimiliki kyai diharapkan berupaya mencerahkan masyarakat luas melalui fatwa-fatwa atau nasehat yang dibutuhkan umat. Kyai mesti berada di segala golongan karena keberadaan kyai merupakan lambang moralitas dan akhlak mulia, manusia Indonesia berbudi pekerti luhur yang makin sirna dan langka. Melalui moral force keterpurukan bangsa dapat dicegah tidak malah tambah runyam. Bukankah ini yang disebut *high politics* atau politik tingkat tinggi sang kyai.

Pendekatan tradisional meliputi beberapa aspek, yang pertama, pendekatan historis yang menekankan bahasanya pada perkembangan ide – ide politik yang besar. Kedua, pendekatan ligalistik yang menekankan pembahasannya pada konstitusi dan perundang – undangan sebuah negara, dan ketiga, pendekatan institusional yang menekankan pada masalah – masalah institusi politik, seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan lembaga yudikatif. Sedangkan pendekatan perilaku menekankan pada perhatiannya pada perilaku aktor politik. Pendekatan ini menerima institusi politik yang sebagai aspek penting dalam politik. Hakikat politik adalah kegiatan yang terdapat pada



## 2. Keterlibatan kyai berpolitik

Kemashyuran atau keterkenalan pesantren biasanya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dan peran Kyai sebagai orang yang menguasai dan mengajarkan ilmu agama di pesantren kepada para santri. Kepemimpinan Kyai di pesantren diakui cukup efektif untuk meningkatkan citra pesantren tersebut dimata masyarakat luas. Ketenaran pesantren biasanya berbanding lurus dengan nama besar kyai nya terutama kyai pendiri pesantren tersebut. Sosok kyai di pesantren tidak hanya selaku guru yang mengajarkan agama tetapi juga menjadi figur pemimpin yang mampu mengarahkan para santri dan pengikut atau pendukungnya dalam menempuh jalan hidup dan kehidupan mereka sehari-harinya. Kyai merupakan pemimpin sekaligus tokoh masyarakat yang menjadi panutan umat di lingkungan bahkan simpatisan dan pendukung kyai bisa menembus batas wilayah pesantren.

Efektivitas kepemimpinan Kyai di pesantren jika ditinjau dari teori kepemimpinan paling tidak memiliki 2 pendekatan yakni (1) power-pengaruh dan (2) pendekatan sifat (trait theory). Yukl dalam Sonhaji (2003) mengungkapkan keefektifan kepemimpinan berdasarkan pendekatan yang pertama itu ditentukan oleh besarnya power yang dimiliki pemimpin (kyai). Power seorang kyai merupakan kekuatan yang diakui oleh pengikutnya menjadi suatu hal yang dapat mempengaruhi mereka. Power ini dapat berupa kedalaman ilmu sang kyai dalam agama serta otoritas yang dimiliki kyai terhadap pesantrennya. Sedangkan pendekatan sifat sering disebut sebagai pendekatan karismatik yakni atribut-atribut personal yang dimiliki kyai





yang besar dan bersifat fisik, militer misalnya) apabila tidak mampu maka hendaknya ia merubahnya dengan mulutnya (dengan perkataan, kritik dan nasehat misalnya) apabila tidak mampu juga, lakukan dengan hati (pada diri sendiri yaitu dengan hati, agar tidak mengikuti kemungkaran tersebut juga) dan itu adalah tingkatan iman yang paling rendah. Rendahnya iman ditandai dengan sedikitnya atau tidak ada sama sekali usaha yang dilakukan untuk merubah kemungkaran tadi. Sedangkan usaha tersebut sangat tergantung dengan sarana kekuasaan, yang jadi permasalahannya selanjutnya adalah cara mendapatkan serta mempengaruhi kekuasaan tersebut. Pada zaman sekarang dengan keadaan yang tidak terlalu menguntungkan, tidak ada cara paling efektif selain berpolitik.

Dengan demikian, hubungan Islam dan politik adalah jelas. Melalaikan diri dari aktivitas politik Islam juga jelas bahayanya bagi kaum Muslim. Inilah saatnya kaum Muslim bangkit dari tidurnya yang panjang, berjuang secara politik untuk melawan penjajah yang selama ini telah menindas mereka. Dan disinilah latek penting bagi kaum Muslim mempelajari lebih jauh politik Islam. Dan tentu saja setelah itu, terjun langsung dalam masalah politik, tidak hanya diam dan menunggu datangnya pertolongan Allah SWT.

Sejak memasuki dunia politik praktis, ada gejala deapresiasi terhadap peranan eksistensi para kiai. Rusaknya citra kiai sudah dimulai sejak keterlibatan mereka dalam politik praktis. Gempuran dan godaan kepentingan-kepentingan pragmatis telah menyeret sebagian para kiai ke dalam ruang





Kehadiran kyai di tengah-tengah masyarakat bagaikan sebuah payung raksasa. Payung tersebut memiliki kesanggupan yang dahsyat menjadi pengayom masyarakat di sekelilingnya. Kapan dan di manapun mereka membutuhkannya, pengayoman dari sang kiai itupun akan didapatkannya dengan sangat mudah. Sebab apapun permasalahan yang menimpa masyarakat, mulai dari problematika rumah tangga, problem-problem sosial, tradisi kultural, kondisi keamanan, hingga merebak ke wilayah carut-marutnya politik bangsa pun, maka sang kiai akan selalu hadir bersama-sama mereka untuk segera menyelesaikannya. Hubungan timbal-balik inilah yang mengakibatkan tali ikatan antara keduanya (kiai dan masyarakat) teramat sulit untuk diputuskan.

Bentuk keterlibatan politik Kyai di tambak beras ternyata beraneka ragam. Kyai religius cenderung pasif, netral dan bahkan banyak juga diantara mereka yang golput dalam menentukan sikapnya terhadap afiliasi politik. Hal ini disebabkan karena kyai religius memiliki background pendidikan pesantren, mereka memiliki ekonomi yang kuat, banyak menghabiskan waktunya untuk mendidik santri di pondok pesantren, untuk kegiatan dakwah, membantu masyarakat yang membutuhkan, serta melakukan pendekatan kepada Allah SWT. Namun jika mereka tidak memiliki ekonomi yang kuat seringkali Kyai menjadi bersikap aktif dan kritis.

Namun demikian jika kita bicara hubungan politik versus Agama, sudah barang tentu dalam hal ini ulama' atau kiai sayogyanya menganut





















masih banyak ditemukan. Budaya ini masih ditemui di beberapa daerah di Indonesia.

Kyai pada awalnya bergerak di jalur kultural, yang dalam bahasa Clifford Geertz (1981) disebut cultural broker (makelar budaya), di tengah arus proses politik yang terjadi sekarang ini seakan menjadi aktor pemberi legitimasi politik. Garis perjuangan Kyai mulai bergeser seiring dengan perubahan politik di tanah air. Kyai pun mulai merambah wilayah politik partisan dengan segala manuver politik dukung- mendukung (legitimasi) yang seringkali dinamai dengan istilah memberi restu atau silaturahmi.

Kyai yang sakral dan sangat dihormati oleh umat menjadi hilang begitu saja karena terlibat dalam permainan politik. Moral Politik Kyai Kyai sebenarnya punya beberapa peran, yakni sebagai pemuka agama, konsultan sosial, dan politik. Sebagai pemuka agama Kyai bertindak sebagai pemimpin ibadah (shalat, doa, zakat, puasa), dan pemberi fatwa keagamaan. Sebagai konsultan sosial, dijadikan tempat bertanya pengikutnya untuk meminta nasihat, minta penyembuhan, dan sebagai orang yang dituakan. Dalam politik, akan memainkan peran moral yang terkait dengan kepentingan umum ke berbagai saluran politik, baik langsung maupun tidak langsung.

Pandangan para ilmuwan Jerman semasa hidupnya Max Weber bahwa birokrasi itu dibentuk independent dari kekuatan politik. Ia berada diluar atau diatas aktor-aktor politik yang saling berkompetisi satu sama lain. Birokrasi pemerintahan diposisikan sebagai kekuatan yang netral. Netralitas birokrasi diartikan bukan dalam hal lebih condong menjalankan kebijakan atau

perintah dari kekuatan politik yang sedang memerintah sebagai masternya pada saat tertentu. Akan tetapi lebih diutamakan kepada kepentingan negara dan rakyat secara keseluruhan. Sehingga siapapun kekuatan politik yang memerintah birokrat dan birokrasinya memberikan pelayanan terbaik kepadanya.

Selama hidupnya parsons membuat sejumlah karya teoritis, ada perbedaan penting antara karya awal dan karya yang belakangan teori fungsional struktural. Bahasan tentang fungsionalisme struktural parsons ini akan dimulai dengan empat fungsi penting untuk sistem tindakan yang terkenal dengan skema "AGIL". AGIL suatu fungsi (function) adalah kumpulan kegiatan yang ditunjukan kearah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem, dengan menggunakan definisi ini parsons yakin bahwa ada empat fungsi yang diperlukan semua sistem :

1. Adaption (adaptasi) sebuah sistem harus nmenanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
2. Goal attainment (pencapaian tujuan) sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
3. Integration (Integrasi) sebuah sistm harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi (A,G,L).





berbeda sebelumnya, serta tanggapan masyarakat tentang peran sosial politik kyai ialah kekharisman (wibawa) seorang kyai akan sedikit memudar karena masyarakat memandang dunia politik itu hanya sekedar untuk memperoleh atau memperebutkan kekuasaan.

Hasil Skripsi Siti Nurudiniyah, 2010 tentang **Strategi Politik Kyai Dan Blater Dalam Pemilihan Kepala Desa Didesa Jangkar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan**. dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) peran kyai dan blater sangat dominan dalam mempengaruhi politik masyarakat terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa didesa jangkar hal itu terkait dengan kultur budaya masyarakat yang masih menganggap kyai dan blater sebagai dua rezim yang harus ditaati dan dipatuhi. (2) sementara itu kemenangan yang diraih oleh tokoh blater lebih disebabkan oleh faktor ketergantungan keamanan masyarakat terhadap kalangan blater.

Hasil Skripsi Abdul Hatib, 2007 tentang **Perilaku Politik Kyai Pesantren Pesantren Bangkalan (Studi Analisis Afiliasi Kyai Pesantren Bangkalan Ke Partai Kebangkitan Bangsa)** . hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hal-hal yang mempengaruhi kyai pesantren bangkalan berafiliasi ke PKB antara lain : (1) Sikap politik NU dengan memfasilitasi berdirinya PKB, (2) Adanya kyai pesantren besar dalam kepengurusan PKB, (3) Tradisi pesantren, sedangkan pandangan kyai pesantren tentang syariat sebagai substansi, melihat bangsa indonesia yang majemuk maka syariat

















status-status itu merupakan seperangkat peranan atau perilakunya atas seseorang dalam status tertentu. Status dan peranan saling mempengaruhi satu sama lain. Status guru sekolah misalnya, menghendaki perilaku-perilaku tertentu bagi seseorang yang menduduki posisi itu, dan mempengaruhi tingkah laku orang tersebut. Mungkin saja seseorang menyimpang jauh dari seperangkat tingkah laku yang diharapkan (karena dia menduduki posisi status tertentu), tetapi statusnya mungkin berubah. Fungsi sosial dan struktur sosial berhubungan sangat erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam proses perubahan sosial, jika salah satu berubah, maka yang lain akan berubah juga

Untuk menjelaskan keadaan sosial budaya yang ada di Desa Tambak Rejodapat kita ketahui dari keadaan wilayahnya. Di mana usaha pertanian yang dilakukan masyarakat tambak rejo sebagian besar ditopang lewat pertanian yaitu dengan mengerjakan tanah sawah. Koentjaraningrat menyatakan bahwa pelaksanaan kehidupan masyarakat memerlukan etos kerja kolektif, yang tercermin sikap dan sifat kerjasama seperti: gotong-royong, tolong menolong, rasa senasib dan sepenanggungan dalam suka dan duka. Hubungan sosial di desa sebagian besar berdasarkan sistem gotong-royong, sistem itu oleh orang desa dipahami sebagai perluasan hubungan kekerabatan yang mempunyai pengaruh kuat atas seluruh kompleks hubungan interpersonal di seluruh desa. Sistem komunal artinya, seseorang harus tunduk pada kepentingan bersama-sama, dikemudian hari bisa terjadi perbedaan pendapat, karena adanya perubahan keadaan.



























yang berpolitik, masyarakat mengetahui kalau kyai jarang berada di pondok pesantren, beliau menghabiskan waktu diluar pondok, sering mendapat panggilan kesana kemari untuk mengisi pengajian, tapi disisi lain atau masyarakat yang mengetahui kyai yang terjun ke dunia politik adalah hal yang tabu diperdengarkan tapi masyarakat di desa tambak rejo ini masih bias mengontrol sikap dan sifat kepada para kyai, dan masyarakat banyak yang merasa kehidupan di pondok tahun dulu sama tahun belakangan ini makin berkurang para santrinya, para siswa siswi tsanawiyah maupun aliyah banyak yang kost, padahal aliyah dan tsanawiyah bahrul ulum ini merupakan sekolah yang masih bernaungan didalam yayasan pondok pesantren.

Kepemimpinan karismatik kyai ini sudah umum dikenali masyarakat. Pengaruh kyai yang kuat "dimanfaatkan" atau menjadi incaran para politisi untuk mendulang suara. Berbagai taktik dan strategi kampanye politik yang dijalankan partai politik biasanya tidak melupakan akan arti penting peran kyai terdepan dalam mengumpulkan suara pemilih. Apalagi, semenjak bergulirnya reformasi banyak partai mengusung azas Islam sebagai platform dan landasan ideologis partai. Hal ini tampak sejalan dengan aktivitas kyai yang menyebar-luaskan ajaran Islam. Tentu tidak dapat dihindari terjadi "pemanfaatan" kepemimpinan kyai di pesantren oleh para politisi baik yang mengusung azas Islam maupun nasionalis (pragmatism).

Bentuk keterlibatan politik Kyai di tambak beras beraneka ragam. Kyai religius cenderung pasif, netral dan bahkan banyak juga diantara mereka yang golput dalam menentukan sikapnya terhadap politik. Hal ini disebabkan karena kyai religius memiliki background pendidikan pesantren, mereka memiliki ekonomi yang kuat, banyak menghabiskan waktunya untuk mendidik santri di pondok pesantren, untuk kegiatan dakwah, membantu masyarakat yang membutuhkan, serta melakukan pendekatan kepada Allah SWT. Namun jika mereka tidak memiliki ekonomi yang kuat seringkali Kyai menjadi bersikap aktif dan kritis, Ceramah-ceramah Keagamaan atau pengajian Selain untuk kampanye lapangan kecamatan jombang sering di gunakan sebagai tempat pengajian dalam rangka kampanye partai tertentu. Pada waktu kampanye tamu undangannya adalah para kyai yang berasal dari berbagai wilayah di jombang yang mendukung partai tersebut dan beberapa kyai mengisi acara tersebut. Acara tersebut termasuk sukses karena dihadiri oleh para calon anggota legislatif dari partai tersebut dan dihadiri juga oleh para pendukung partai dari berbagai lapisan masyarakat.

Perkembangan politik praktis membawa sejumlah kyai terjun langsung maupun tidak langsung dalam kancah perpolitikan di Tanah Air. Aspirasi politik kyai dimanfaatkan partai politik di tingkat nasional maupun lokal dalam setiap Pemilu. Alhasil, kyai dihadapkan pada dunia politik praktis yang sarat dengan ketidakpastian dan kepentingan. Tidak ada musuh abadi kecuali kepentingan abadi.











